BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya tanah dalam kehidupan manusia sangatlah besar. Pasalnya, keberadaan tanah tidak bisa dipisahkan bagi hampir semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Negara tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja, namun mencakup seluruh penghidupan dan penghidupan. Masyarakat Indonesia menggunakan istilah “tanah air” dan “Tumpah darah” dengan arti yang berbeda-beda untuk menyebut wilayah negara yang didominasi daratan dan perairan, yang mempunyai kedaulatan. Tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia (Laturette, 2021).

Hutan memiliki peran penting dalam pembangunan negara sebagai sistem pendukung kehidupan dan sumber daya alam. Namun, pemanfaatan hutan untuk berbagai kegiatan seperti budidaya kehutanan atau ekonomi sering menimbulkan tumpang tindih aktivitas, yang berujung pada konflik dan ketidakpastian pemanfaatan. Untuk mengatur dan meminimalisir hal tersebut, pemerintah menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, atau kegiatan ekonomi lainnya (Bahri, 2019).

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya penulis menggunakan istilah IPPKH, merupakan izin pemanfaatan kawasan hutan yang sebelumnya dikenal sebagai Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Perubahan istilah ini pada dasarnya berfokus pada pergeseran dari kata "perjanjian" menjadi "izin," yang dipengaruhi oleh pemahaman mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan penggunaan kawasan hutan tersebut (Paksi et al., 2017).

Istilah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kini peraturan tersebut dicabut dan digantikan menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam Pasal 1 peraturan tersebut bahwa “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.”

Kasus kepemilikan tanah di Indonesia sering muncul akibat klaim, pengaduan, atau keberatan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkepentingan terhadap status hukum suatu tanah, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak

terkait. Permasalahan ini umumnya berkaitan dengan status tanah, kepemilikan, serta bukti perolehan hak atas tanah (Shebubakar & Raniah, 2021).

Sengketa kepemilikan lahan seluas $\pm$ 6,7 hektare di Blok Cijengkol, yang disebut sebagai Petak 25A RPH Kutapohaci, BKPH Telukjambe, terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, melibatkan warga yang terdiri dari Ara dan Aceng Lesmana, yang selanjutnya penulis menggunakan istilah Ara CS, berkonflik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kawasan tersebut dikelola oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta.

Kronologinya bermula dari kepemilikan lahan atas nama Ondo, yang merupakan orang tua dari Ara. Pada suatu waktu, seorang bernama Abdul Rojak membeli tanah tersebut dari Ondo dengan tujuan untuk mengganti lahan kawasan hutan negara yang sebelumnya telah ia garap secara ilegal. Perhutani sebagai pihak pengelola menyatakan bahwa pada tahun 1975, Abdul Rojak telah melakukan pembabatan hutan negara di lokasi lain dan sebagai bentuk tanggung jawab, tahun 1975 dan 1976, ia kemudian berinisiatif menyerahkan lahan yang dibelinya dari Ondo kepada negara melalui mekanisme tukar menukar atau tukar guling.

Lahan hasil pembelian dari Ondo inilah yang kemudian diakui oleh Perum Perhutani sebagai bagian dari kawasan hutan negara melalui proses tukar guling tersebut. Kawasan ini selanjutnya dikelola oleh Perum Perhutani sebagai bagian dari pengelolaan hutan produksi tetap. Atas dasar

pengelolaan tersebut dan status sebagai kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kemudian menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk seluas $\pm 2,57$ hektare untuk kegiatan pembangunan jalan akses.

Namun, klaim tersebut menjadi sengketa ketika ahli waris Ondo, yaitu Ara dan keluarganya tetap mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Pihak Ara CS mengklaim bahwa lahan itu telah digarap dan dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga mereka jauh sebelum tahun 1960. Klaim ini didukung oleh sejumlah dokumen seperti Letter C Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), serta pengakuan hak atas tanah dari aparat desa dan kecamatan setempat. Mereka mengutamakan surat Letter C sebagai bukti tradisional kepemilikan berdasarkan adat istiadat.

Sebaliknya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berpegang teguh bahwa tanah tersebut milik negara berdasarkan pada dokumen seperti Berita Acara Tata Batas (BATB) Abdul Rojak dengan Perhutani pada tahun 1975 dan 1976, serta ditambahkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 280 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Akses juga telah memberikan kontribusi bagi PT Indah

Kiat Plup & Paper TBK seluas $\pm$ 2,57 ha (dua lima puluh tujuh persen hektar) berada pada kawasan hutan produksi tetap.

Dalam memastikan suatu permasalahan hukum, alat bukti yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung kejelasan hak kepemilikan. Bagian alat bukti, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dijelaskan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat menjadi KUHPer atau Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (Achmad & Maskanah, 2020).

Dengan adanya hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu tumpang tindih atau Overlapping antara alat bukti yang dimiliki oleh Ara CS yaitu Letter C sebagai kepemilikan tanah dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Penelitian sebelumnya terkait Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah telah dilakukan oleh Barikli Mubarak pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki nilai pembuktian dalam administrasi lokal, tetapi kekuatannya di hadapan hukum masih di bawah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga masyarakat yang hanya mengandalkan Letter C menghadapi risiko hukum, khususnya dalam sengketa kepemilikan.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas Letter C dalam kasus Ara CS, namun perbedaannya terletak pada fokus bahwa penelitian sebelumnya membandingkan Letter C dengan

Berita Acara Tata Batas (BATB), sedangkan penelitian saat ini akan berfokus pada tumpang tindih antara alat bukti Letter C dan Keputusan Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Topik ini menarik bagi penulis dalam penjelasan latar belakang untuk mendalami dan mengkaji permasalahan serta menyajikannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI LETTER C SEBAGAI KEPEMILIKAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH DENGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana kekuatan pembuktian antara Letter C dengan pembuktian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 373/G/2024/PTUN.JKT terkait kedudukan alat bukti kepemilikan atas tanah yang disengketakan oleh para pihak?
3. Bagaimana kedudukan hukum alat bukti Letter C sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang telah dialihkan kepada negara atau Perhutani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, penulisan ini

bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui serta mengkaji kekuatan pembuktian antara Letter C dengan pembuktian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH) menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 373/G/2024/PTUN.JKT terkait kedudukan alat bukti kepemilikan atas tanah yang disengketakan oleh para pihak.
3. Untuk mengetahui serta mengkaji kedudukan hukum alat bukti Letter C sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang telah dialihkan kepada negara atau Perhutani.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, yaitu

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharap dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum pertanahan, khususnya berkaitan dengan alat bukti kepemilikan tanah berupa Letter C dan perizinan pengelolaan kawasan hutan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
 - b. Diharap dapat digunakan sebagai referensi akademik dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konflik agraria, sengketa pertanahan, serta pembuktian hak milik tanah berdasarkan dokumen non-sertifikat di tengah

kebijakan pengelolaan hutan oleh negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan diskusi dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum acara perdata, dan hukum pembuktian. Selain itu, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami permasalahan dualisme pembuktian antara masyarakat adat dan negara dalam konteks sengketa pertanahan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan pendaftaran tanah secara resmi, serta memahami posisi hukum dokumen seperti Letter C yang kerap dijadikan dasar klaim kepemilikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan aparat desa dalam menjaga dokumen pertanahan serta mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan hukum yang tepat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara normatif, pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Negara

hukum menuntut agar seluruh tindakan pejabat publik dan warga negara tunduk pada hukum yang berlaku, serta semua kewenangan dan tindakan lembaga negara dan warga negara harus berdasarkan undang-undang, dengan memperhatikan hierarki dan saling keterkaitan di dalamnya (Rais, 2022).

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menerapkan asas kepastian hukum sebagai salah satu pilar sistem hukumnya. Asas ini menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan dalam setiap kebijakan pemerintah. Kepastian hukum berarti ketentuan hukum harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda, sehingga norma-norma hukum saling mendukung tanpa menimbulkan konflik akibat ketidakpastian (Asmara et al., 2020).

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch sebagai *middle theory*. Teori tersebut merupakan salah satu bagian dari teori tujuan hukum, dimana Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum, bersama keadilan dan kemanfaatan merupakan tiga nilai utama yang menjadi dasar tujuan hukum.

Dalam teorinya tentang kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan ada empat aspek mendasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum merupakan hal yang bersifat positif, artinya hukum positif adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dan harus ditaati oleh seluruh

warga negara.

2. Hukum harus didasarkan pada fakta, yaitu hukum dibentuk berdasarkan kondisi nyata dalam masyarakat, sehingga mencerminkan kebutuhan dan kenyataan sosial yang ada.
3. Fakta yang dituangkan dalam hukum harus dirumuskan secara jelas, agar tidak menimbulkan multitafsir atau kesalahan dalam penafsiran serta mempermudah pelaksanaan hukum secara konsisten.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, karena perubahan hukum yang terlalu sering akan mengganggu stabilitas dan kepastian hukum itu sendiri, serta menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Menurut pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum menekankan bahwa hukum positif merupakan aturan yang mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan wajib dipatuhi, meskipun dalam penerapannya terkadang dianggap kurang mencerminkan keadilan. Selain itu, kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu kondisi yang tetap, jelas, dan mengikat dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang pasti.

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah digunakan sebagai dasar penerapan teori hukum dalam *applied theory*.

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”, Frasa "surat tanda bukti hak" tersebut kemudian ditafsirkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

F. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami suatu masalah. Oleh karena itu, diperlukan metodologi ilmiah tertentu. Metode penelitian berikut digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hukum dan peraturan yang terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif terkait dengan isu yang dihadapi dijelaskan melalui penelitian deskriptif analitis (Pahlevi et al., 2017).

Dalam tulisan ini, penulis berupaya untuk meneliti dan menganalisis penerbitan IPPKH yang berkaitan dengan bukti dengan warga desa Mulyasari berupa Letter C.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang berfokus pada analisis hukum tertulis, peraturan, dan norma sosial dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Sebagian besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang dapat dikategorikan sebagai tinjauan pustaka, adalah sumber sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar informasi yang digunakan berasal dari peraturan atau undang-undang tertulis yang diterima oleh masyarakat (Armia, 2022).

Penulis mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Peraturan tersebut mencakup mengenai pengelolaan kehutanan, termasuk penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan serta ketentuan mengatur pendaftaran tanah.

3. Tahap Penelitian

Beberapa langkah penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan atau *Library Research*

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembuktian dari penerbitan izin pinjam pakai dan Letter C. Sehingga, sumber-sumber tersebut membantu dalam menganalisis, mengkaji, dan memahami terhadap sumber hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau rekomendasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder disebut data tersier. Sumber daya ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus terkait lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan adalah informasi yang diperoleh dari responden dan informan, termasuk yang bersangkutan dengan permasalahan Letter C dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

4. Teknik Pengumpul Data

Peneliti menggunakan dua proses ketika mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan informasi dan referensi dari berbagai bahan tertulis seperti jurnal, artikel, buku-buku dan lainnya. Teknik ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Dengan memanfaatkan teknik ini, peneliti dapat memanfaatkan seluruh informasi dan ide-ide yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Salah satu teknik yang digunakan adalah studi lapangan, di mana peneliti melibatkan kegiatan wawancara untuk mengungkap fakta-fakta guna mengumpulkan data. Metode ini merupakan pendekatan ilmiah yang dilaksanakan dengan perencanaan strategis, sehingga menghasilkan data yang akurat.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah literatur, seperti jurnal, buku, serta sumber hukum lain yang relevan. Selain itu, alat tulis digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Data lapangan merupakan informasi yang diambil

secara langsung. Alat pengumpul data yang dimanfaatkan berupa *gadget*, seperti laptop, *handphone* untuk mengetik, bersama dengan sarana pendukung lainnya yang mempermudah proses penelitian dan analisis data.

6. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyusun, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam perjalanan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Artinya, peneliti berusaha menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada pada wilayah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum, UNPAS. Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40251;

b. Studi Lapangan

- 1) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Jalan Soekarno Hatta Nomor 628, Kelurahan Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40292;

- 2) Perum Perhutani KPH Purwakarta. Jalan Siliwangi
Nomor 35, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
41111.